

**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM TENTANG
KHALWAT
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)**

TESIS

Oleh

**MUHI BUDDIN
077005148/HK**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM TENTANG
KHALWAT
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora
Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**MUHIBUDDIN
077005148/HK**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

Judul Tesis : **PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM TENTANG KHALWAT DI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
(Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)

Nama Mahasiswa : **Muhibuddin**
Nomor Pokok : **077005148**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

(Prof. Muhammad Abduh, SH)
Ketua

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH., MS)
Anggota

(Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M.Hum.)
Anggota

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH)

(Prof. Dr. Runtung .SH., M.Hum.)

Lulus Tanggal : 22 Desember 2009

**Telah diuji pada
Tanggal 22 Desember 2009**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : 1. Prof. Muhammad Abduh, SH
Anggota 2. DR. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S
3. DR. Faisal Akbar Nasution, SH., M. Hum
4. Prof. DR. Suhaidi, SH., MH
5. DR. Sunarmi, SH., M. Hum

ABSTRAK

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-undang. Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas. Maka memungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh dan Irian Jaya. Dan hasil amandemen kedua Pasal 18 dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan harapan bagi Provinsi Aceh melaksanakan syari'at Islam kembali didaerah serambi mekah.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan keistimewaan bagi Aceh yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dikuatkan kembali dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang meliputi Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Aceh.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya kalangan sarjana hukum, data yang diperoleh dari lapangan, berupa hasil wawancara dari para informan dan nara sumber yang berkompeten di bidangnya, yang ada keterkaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum terlaksana dengan baik antara lain. (1). Pelaksanaan syari'at Islam tentang khalwat di Aceh adalah tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (2). Penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum efektif (3). Perlu segera merevisikan Qanun Pidana (Jinayah) khususnya Qanun No. 14 tentang Khalwat. (4). Belum dimasukan Materi muatan lokal yang sesuai dengan syari'at Islam kedalam kurikulum pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sesuai standar pendidikan nasional, sehingga tidak memberikan dampak positif bagi remaja, pelajar dan para mahasiswa dalam memahami penting diberlakukan penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Syari'at, Islam, Khalwat, Provinsi, Nanggroe, Aceh, Darussalam.

ABSTRACT

Chapter 18 B verses (1) of Republic of Indonesian's Constitution 1945 stated that the state recognizes and respect the special or extraordinary regional government units as regulated by the Law. The word "special" has wide scope. It is then possible to form regional government with special autonomy such as Aceh and Irian Jaya. And result of second amendment of chapter 18 and chapter 18 B of The Republic of Indonesian's Constitution 1945 has given an expectation for Province of Aceh to implement the Islamic Syariah again in Serambi Mekkah.

The implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam is a specialization for Aceh that has been regulated through the Law No. 44/1999 regarding The Implementation of Special Aceh Province, and it was then reconfirmed by the Law No. 18/2001 regarding the special autonomy for Aceh Province as Province of Nanggroe Aceh Darussalam, that has been replaced with the Law No. 11/2006 regarding Government of Aceh, including religious life, customs, education and the role of Ulama in policy making of Aceh region.

This research was conducted to know the implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam. This was a descriptive research using juridical and normative methods, a method of research referring on law norms found in the statutes, and statutes related to implementation of Islamic Syariat on Khalawat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam. The main data of research was secondary data explaining the primary data, including the law drafting, the results of researches, scholarship works, the field data, interview result of informants and the competent respondents in their parts, related to Implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam.

It could be then concluded that implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam was still insufficient: 1. The implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Aceh could not be realized completely because it was controversial to regulation of higher statutes, 2. There was no effective law enforcement so far, 3. particularly Qanum No. 14 regarding the khalwat. 4. The local material was not included yet according to Islamic Syariat into curriculum of Elementary School until Senior High School as described in national education standard, thus it could not exert positive impact on adolescents, students or pupils in understanding the importance of Islamic Syariat implementation in Aceh.

Keywords: Implementation, Islamic, Syari'at, Khalwat (prostitution), Province, Nanggroe, Aceh, Darussalam.

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT. Serta do'a yang tiada putusnya dari kedua Orang Tua, Anak dan istri tercinta. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan, untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Adapun tesis ini berjudul **“Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” (Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat).**

Penulis menyadari bahwa dalam penyesunan tesis ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, masukan, arahan, dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan tertinggi dan tulus ikhlas yang tak terhingga, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (k) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Muhammad Abduh, S.H., Dr. Pendastaren Taregan, S.H., M.Si. DR. Faisal Akbar Nasution, S.H., M. Hum. Selaku pembimbing yang tidak bosan-bosannya

memberikan membimbing kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H. Dr. Sunarmi, S.H., M. Hum. Selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

5. Prof. A. Hadi Arifin, SE., M. Si. Selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
6. Sulaiman, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi dan selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan tesis.
7. Harun, S.H., M.H. T. Nazaruddin, S.H., M. Hum. Sumiadi, S.H., M. Hum. Ibu Manfarisyah, S.H., M.H. dan Ibu Elidar Sari, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan I, II, III, IV dan Kabag. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Orang tua tercinta, Almarhum ayahanda Tgk. A. Hamid semoga mendapat Syurga Jannatun Na'im dan di tempatkan pada tempat yang mulia disisi ALLAH SWT dan ibunda tersayang Asmawati yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan memberikan dukungan moril serta materil yang tiada henti-hentinya.
9. Kakak dan abang serta adik-adikku tercinta, Nurhayati, Almarhumah Farida, Husaini, Nurzakiah. Misbahuddin, Musriadi dan Rahmaniah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tiada terhingga.
10. Istri tercinta Nasrianti, S.H., M. Hum. dan anak tersayang Jimly Ash Shiddiqie, yang telah rela berkorban jauh dengan penulis, dan memberikan motivasi, pengertian serta memberikan spirit terus maju pada penulis dengan harapan dapat secepatnya menyelesaikan pendidikan PPs untuk dapat berkumpul kembali dengan keluarga.

11. Civitas Akademika Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 ke Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
12. Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara di Medan yang telah banyak membantu dalam proses belajar mengajar di kampus Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
13. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang selalu kompak dan penuh keceriaan menjalani hari-hari perkuliahan dan selalu memberikan motivasi, semangat dan tidak bosan-bosannya mengingatkan penulis untuk secepatnya menyelesaikan tesis.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak.

Medan, Oktober 2009,

Penulis

MUHIBUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhibuddin

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Hagu/ 27 Agustus 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Kawin

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Samudera Tahun 1990

- Sekolah Tingkat Pertama Mhammadiyah (SMPM) Lhokseumwe Tahun 1995
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Samudera Tahun 1998
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2003
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Konsepsi.....	32
G. Metode Penelitian.....	34
BAB II : KEDUDUKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH	40
A. Kedudukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.....	40
B. Kedudukan Qanun Dalam Sistem Hukum Nasional.....	68
C. Kedudukan Pemberlakuan Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Pemerintahan Daerah.....	89

BAB III :	PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM TENTANG KHALWAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....	104
A.	Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	104
B.	Perbuatan Khalwat/Meusum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	120
C.	Kewenangan Makamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	126
BAB IV :	HAMBATAN ATAU KENDALA PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM TENTANG KHALWAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....	140
A.	Hambatan atau Kendala Penyelenggaraan Syari'at Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	140
B.	Hambatan atau Kendala Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	147
C.	Upaya Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari'at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	153
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
A.	Kesimpulan.....	160
B.	Saran.....	162
	DAFTAR PUSTAKA.....	164

DAFTAR SINGKATAN

AMM	Acheh Monitoring Mission
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ADB	Aceh Developmen Board
AM	Aceh Merdeka
Bappeda	Badan Perancang dan Pembangunan Daerah
CoHA	Cessation of Hostilities Agreement
DOM	Daerah Operasi Militer
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPSU	Dewan Perwakilan Sumatera
DI	Darul Islam
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
KPPSU	Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara
KMB	Komprensi Meja Bundar
KDMA	Komando Daerah Militer Aceh
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama
MoU	Memorandum of Understanding
NGO	Non Government Organitation
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PEPERDA	Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
Perpres	Peraturan Presiden
Perda	Peraturan Daerah
PDRI	Pemerintah Darurat Republik Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
TII	Tentara Islam Indonesia
UD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
UU	Undang-Undang
WH	Wilayatul Hisbah

DAFTAR ISTILAH ISLAM

Qanun	Peraturan Daerah Aceh
Islam	Tuntunan, bimbingan dan aturan ALLAH
Hukum Islam	Hukum Syari'at Islam
Syari'at	Ketetapan Allah dan Ketentuan Rasul-Nya
Khalwat/Meusum	Perbuatan yang berpeluang terjadinya zina
Mahkamah Syar'iyah	Tempat melaksanakan Peradilan Syari'at Islam
Kaffah	Sempurna
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	Hukum Keluarga
Mu'amalah	Hukum Perdagangan
Jarimah	Perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana
Jinayah	Hukum Pidana
Hudud/Qisas	Hukuman berdasarkan ketentuan Nas Al-Qur'an
Ta'zir	Penentuan hukuman didasarkan pada Ijma' Ulama
Uqubat	Ancaman hukuman terhadap pelanggar Jarimah
Cambuk	Hukuman pencabukann yang dilakukan dengan rotan
Zina	Hubungan persetubuhan yang bukan suami istri